

Policy Paper

Analisis Strategi Kebijakan Penanggulangan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan

Lisa Aryani (2326061009)

EXECUTIVE SUMMARY

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kinerja kunci Bupati Lampung Selatan, pencapaian kinerja ini dinilai baik jika target penurunan angka kemiskinan yang sudah direncanakan dalam Dokumen RPJMD tercapai dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dimana pada tahun 2024 Presiden mengintrusikan angka kemiskinan ekstrem 0%, hal ini sesuai dengan tugas tambahan untuk Bappeda agar lebih focus dalam perencanaan pembangunan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hambatan dalam penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program kegiatan penanggulangan kemiskinan. *Policy paper* ini menganalisa peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam menentukan strategi kebijakan dan manfaat program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Lampung Selatan.

Kata kunci: Kemiskinan Ekstrem; Strategi; Kebijakan; Penanggulangan

INTRODUCTION OR SUMMARY OF THE PROBLEM

Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, *safety life*, mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan

dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.¹

Kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multidimensional), yaitu dimensi ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks adalah dalam arti luas, tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan meliputi semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Dari konsepsi ini maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*).²

Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai tingkat pendapatan yang sangat rendah yang membuat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Penanggulangan kemiskinan haruslah memiliki perencanaan, penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganannya dan didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin.³ Pada masyarakat miskin terdapat kategori masyarakat yang dianggap keadaanya lebih sulit lagi, yaitu adalah kategori masyarakat miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Masyarakat dalam kategori miskin ekstrem merupakan masyarakat yang berada pada tingkat 10% terendah dalam masyarakat miskin atau termasuk dalam Desil 1.⁴

Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan menargetkan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada tahun 2024. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 meminta 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah intervensi yang diperlukan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Berikut ini ditampilkan grafiik kemiskinan di Indonesia hingga maret 2023 menurut BPS:

PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA, MARET 2023

Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th XXVI, 17 Juli 2023

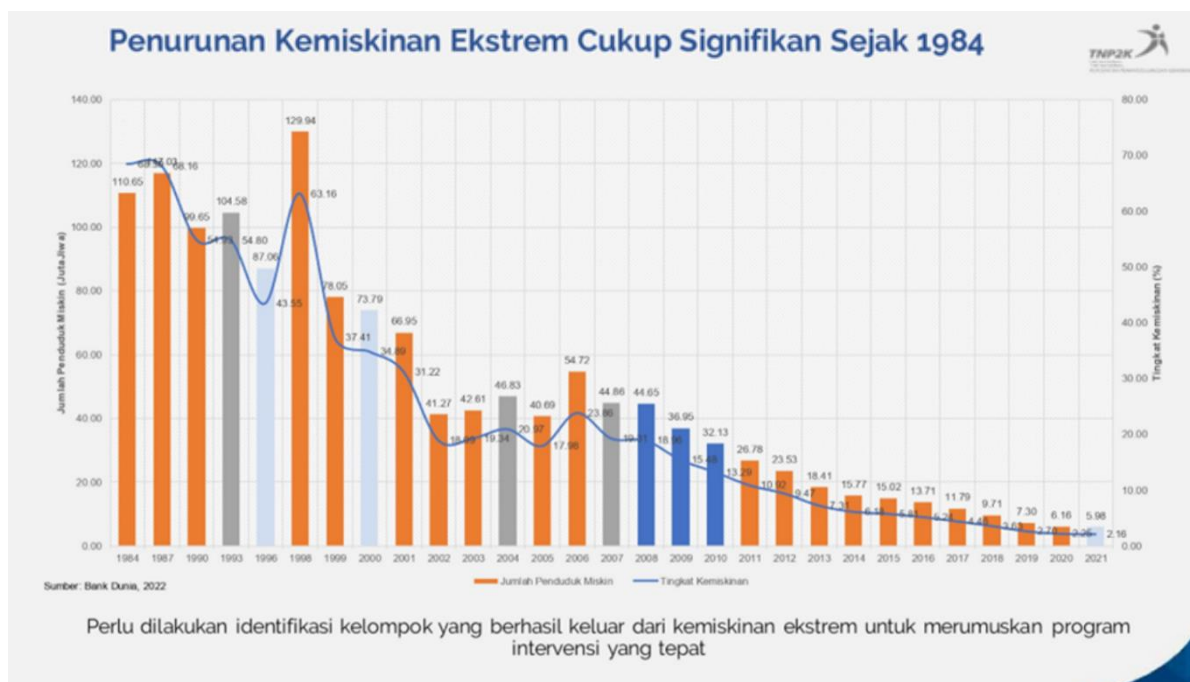


Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2012–Maret 2023



Gambar 1. Grafik Kemiskinan di Indonesia⁵

Dari grafik di atas terlihat jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami tingkat fluktuasi sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 25,90 juta orang atau setara dengan 9,36%. Sedangkan untuk grafik kemiskinan ekstrem, dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 2. Grafik Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia⁶

Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah tinggal 1,12%, atau turun sekitar 0,90% dibanding tahun 2022. Presiden Joko Widodo pun menargetkan pengurangan kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0% - 1% di tahun 2024 melalui Instruksi Presiden No.4 tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam rangka mengurangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, maka dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K sendiri memiliki tugas antara lain:

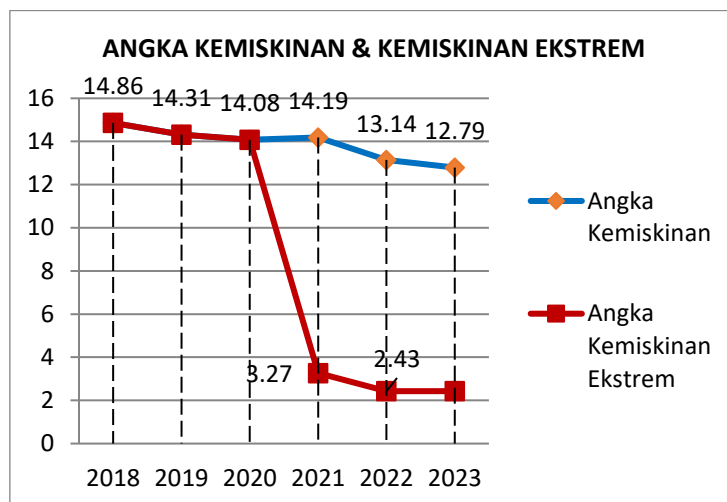
- a) Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- b) Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga.
- c) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Begitupun halnya dengan daerah Kabupaten/Kota, memiliki tim yang bertugas dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam mendukung pencapaian visi dan misi presiden menurunkan angka kemiskinan ekstrem sampai dengan nol persen.⁷

Dalam upaya penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, seperti halnya Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan salah satu indikator kinerja Bupati Lampung

Selatan yaitu kemiskinan serta dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor: B/59/V.01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, maka Kabupaten Lampung Selatan memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2023 masih belum mencapai nol persen, besar angka kemiskinan ekstrem adalah sebesar 2,43%. Berikut ini ditampilkan grafik angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Kabupaten Lampung Selatan:



Gambar 2. Grafik Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Lampung Selatan⁸

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kinerja kunci Bupati Lampung Selatan, pencapaian kinerja ini dinilai baik jika target penurunan angka kemiskinan yang sudah direncanakan dalam Dokumen RPJMD tercapai dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dimana pada tahun 2024 Presiden mengintrusikan angka kemiskinan ekstrem nol persen, hal ini sesuai dengan tugas tambahan untuk Bappeda agar lebih fokus dalam perencanaan pembangunan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.⁹ Adapun beberapa masalah yang berkaitan dengan penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan adalah:

1. Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024 yang harus segera di tindaklanjuti;

3. Masih ditemuinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Demi dapat menysasar percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, untuk itu diperlukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan masalah kemiskinan ekstrem tersebut. Tahapan yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada yaitu dengan analisis manajemen strategis. Prinsip dalam manajemen strategi adalah *strategy formulation* yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang sesungguhnya; adanya strategi implementasi yang menggambarkan cara mencapai tujuan (secara teknis) strategi implementasi mencerminkan kemampuan organisasi dan alokasinya termasuk dalam hal ini adalah alokasi keuangan (dengan anggaran berbasis kinerja); serta strategi evaluasi yang mampu mengukur, mengevaluasi dan memberikan umpan balik kinerja organisasi.¹⁰

Dari hasil observasi pada kemiskinan ekstrem di kabupaten Lampung Selatan, maka ditemukan penyebab diantaranya adalah: 1) Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran, Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan saat ini masih belum tepat menysasar masyarakat miskin ekstrem, karena masih banyaknya jumlah masyarakat miskin ekstrem dan persentase angka kemiskinan ekstrem masih belum dapat mencapai angka 0% seperti yang telah dicanangkan Presiden pada Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Letak geografis daerah yang sulit dijangkau, Masih banyaknya masyarakat miskin ekstrem yang berada di daerah yang sulit terjangkau dengan keadaan geografis yang termasuk kategori sulit dijangkau bahkan masuk daerah blank spot. Kemudian, untuk dapat menekan angka ketidaktepatan dalam pemberian bantuan program bagi masyarakat di letak geografis sulit dijangkau, maka diperlukan perencanaan program bantuan yang diberikan sesuai dengan lokus prioritas kemiskinan ekstrem di daerah. Sehingga nantinya program bantuan yang diterima masyarakat (sasaran penerima manfaat) lebih tersebar secara merata, contohnya seperti pemasangan SRA untuk kualitas air bersih di keluarga miskin ekstrem; 3) Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, karena masih banyaknya masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah serta nilai inflasi yang besar dan masih rendah produktivitas kerja masyarakat di daerah sehingga sulit meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian yang telah dijabarkan, analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tantangan dan peluang dengan adanya strategi berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di daerah.

METHODE APPROACH

Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah diuraikan dengan pendekatan kualitatif dan tinjauan studi literatur. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Pendekatan penelitian kualitatif ialah penelitian memahami fenomena mengenai apa yang dinilai berdasarkan subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Dengan cara deskriptif berupa kata-kata dan bahasa pada suatu lingkup khusus menggunakan beberapa metode alamiah. Penelitian kualitatif mampu menghasilkan hasil penelitian berupa penjabaranyang mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang bisa diamati dalam suatu lingkup tertentu yang dilihat dari sudut pandang yang komprehensif.¹¹ Metodologi untuk mempelajari literatur melibatkan urutan tugas yang berkaitan dengan akuisisi data dari sumber perpustakaan, meneliti dan membuat anotasi bahan yang relevan, serta menganalisis bahan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui sumber data sekunder, antara lain buku, jurnal, artikel ilmiah, kajian pustaka, berita, dan data sekunder lain yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini melakukan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh dari hasil pencarian untuk memberikan rekomendasi bagi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah untuk menentukan strategi dengan mengetahui tantangan dan peluang yang ada.

RESULT BODY

Di antara jumlah penduduk miskin, terdapat penduduk yang tergolong miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah sejenis kemiskinan yang didefinisikan oleh PBB sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan di bawah US\$1,91 PPP (purchasing power parity) per kapita per hari (setara Rp9.089 per hari). PPP didefinisikan sebagai jumlah unit mata uang yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa yang umum yang dapat dibeli oleh satu unit mata uang umum/referensi.¹² Sama halnya dengan pendapat Muhammad Zulfikar Amien dkk, 2022 yang mengatakan bahwak emiskinan ekstrem atau biasa juga disebut sebagai kemiskinan absolute, merupakan sejenis kemiskinan yang didefnisikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai “suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk didalamnya makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal,

pendidikan, dan informasi. Artinya kondisi kemiskinan ekstrem ini tidak dilihat hanya dari tingkat pendapatan masyarakat disuatu daerah saja, melainkan pada tingkat kesehatan, sanitasi, air bersih dan tingkat pendidikan di daerah tersebut.¹³

Analisis SWOT dapat digunakan sebagai strategi kebijakan penanggulangan penghapusan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui keputusan apa yang harus di ambil dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah. Diharapkan dengan analisis itu dapat dapat mengurangi atau meminimalkan jumlah masyarakat dalam kategori miskin ekstrem.

Kekuatan dan Peluang untuk Mengatasi Masalah

Analisis Kekuatan, Sesuai amanah Inpres no.4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan tujuan program yaitu menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Meurunkan beban pengeluaran dengan program bantuan siswa miskin, jaminan kesehatan dan bantuan paket sembako. Sedangkan meningkatkan pendapatan melalui progam bantuan modal dan sarana prasarana Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dan pelatihan kerja bagi wanita rawan sosial. Meminimalkan kantong-kantong kemiskinan seperti rehab rumah tidak layak huni dan pemasangan saluran sanitasi dan air bersih.¹⁴ Menurut Hasibuan dkk tingkat pendidikan yang memadai dapat memperbesar kesempatan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Dalam hal ini, terdapat hubungan yang kuat antara pendidikan dan kemiskinan, dimana melalui pendidikan dapat mengurangi kemiskinan, sedangkan kemiskinan dapat membatasi akses terhadap pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan adalah aspek penting yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Melalui investasi bidang pendidikan maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan keterampilan, dan pengetahuan, sehingga mendorong meningkatnya produktivitas masyarakat. Dalam hal ini, dengan meningkatnya keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas yang dimiliki, maka meningkatkan pendapatan yang diterima dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.¹⁵

Analisis Peluang Kabupaten Lampung Selatan memiliki Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/203/V.01/HK/2023 tentang Lokus Prioritas Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023-2024, kemudian Surat Edaran Bupati Nomor: 29 Tahun 2022

tentang Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lampung Selatan yang dapat dipergunakan Pemerintah maupun pihak terkait kepada masyarakat miskin ekstrem agar bantuan lebih terarah, pelayanan dapat tepat sasaran, sistematis dan berkelanjutan. Seperti hasil penelitian Eko Nur Wahyudi 2022, adanya kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program seperti program kewirausahaan sosial harus terus dilakukan untuk meminimalkan angka kemiskinan ekstrem dan terus dilakukan evaluasi terhadap kebijakan program-program yang ada untuk mencari solusi strategis.¹⁶ Hal ini akan sangat membantu penduduk miskin untuk mandiri, dan meningkatkan penghasilan mereka yang pada gilirannya akan membantu untuk dapat bertahan hidup dan keluar dari garis kemiskinan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lampung perlu mendorong perekonomian daerah dengan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan investasi di sektor-sektor ekonomi guna menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian angka pengangguran juga akan berkurang. Penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat dalam kategori miskin ekstrem agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Pernyataan ini didukung hasil penelitian Musafiran 2023, yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan intervensi kebijakan lintas sektor sesuai core problem dari kemiskinan Ekstrem tersebut. Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan berbagai kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor.¹⁷ Hal yang sama juga diungkapkan Suharlina, yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka program-program yang dicanangkan harus fokus pada peningkatan SDM melalui pendidikan yang merata dan berkualitas, dan jaminan kesehatan.¹⁸

Analisis Ancaman, Strategi Penanggulangan dan penghapusan Kemiskinan ekstrem Daerah telah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun Lokus Kemiskinan daerah, serta surat edaran penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem, pengaplikasiannya diperlukan pengawasan dan disusun program yang lebih praktis, pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak. Seperti yang dilakukan pada penelitian musafiran program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah masih belum optimal.¹⁷ Dari segi pendekatan, program masih terfokus pada aspek ekonomi ketimbang aspek multidimensi, dan dari segi sasaran, program yang dijalankan tidak tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat I G. W. Murjana Yasa dalam wisnutama 2023, bahwa kelemahan berbagai program

penanggulangan kemiskinan, diawali dari beberapa persoalan berikut (1) Program yang dilaksanakan berpedoman pada perguliran dana bantuan. Karena konsepnya adalah bergulir, logikanya yang mampu mengikuti program tersebut adalah mereka yang memiliki usaha produktif, dan kecil kemungkinan masyarakat yang benar-benar miskin dapat mengikuti program dana bergulir (2) Kecilnya peluang rumah tangga miskin ikut dalam pola perguliran disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, sehingga sangat beresiko terhadap keberhasilan program (3) Adanya gejala ketidaktepatan pendataan penduduk miskin, yang terutama dilakukan petugas desa (banjar) yang cenderung pilih kasih, sehingga data penduduk miskin untuk penanggulangan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran (4) Kecenderungan adanya pemilihan daerah sasaran program dengan harapan tingkat keberhasilannya dapat lebih diukur. Hal ini berakibat pula pada salah sasaran (5) Sikap menyalah penduduk miskin yang cenderung pasrah, menerima apa adanya, merasa miskin adalah nasib, takdir dan lainnya adalah sikap mental yang menghambat program kemiskinan (6) Program-program yang cenderung memberi ikan, bukan kail dan atau cara memancing dapat menggeser perilaku masyarakat yang justru ingin menjadi miskin agar mendapat bantuan kemiskinan, bukan justru berupaya bagaimana mereka dapat ke luar dari kemiskinan.¹⁹

PERNYATAAN KEBIJAKAN

Tujuan Kebijakan

Policy paper yang berjudul “Analisis Strategi Kebijakan Penanggulangan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan” bertujuan bagaimana kemiskinan ekstrem di daerah turun melalui hasil analisis strategi kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini berlandaskan dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dimana kemiskinan ekstrem di tahun 2024 menjadi 0%. Berikut beberapa strategi yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem:

1. Strategi Penurunan beban pengeluaran, dengan bantuan sosial paket sembako, pemberian jaminan kesehatan, pendidikan.
2. Strategi Peningkatan Pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan pelatihan kerja, bantuan usaha UMKM, bantuan bibit dan ternak untuk petani.
3. Strategi meminimalkan kantong-kantong kemiskinan, dengan bantuan rehab rumah tidak layak huni, bantuan sambungan listrik, sambungan sanitasi.

Masyarakat miskin ekstrem adalah orang dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhannya, dan bertahan untuk dapat keluar dari garis kemiskinan karena tidak memiliki

keahlian maupun kesempatan. Maka untuk menurunkan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di daerah yang harus 0% tahun 2024 diperlukan ketepatan penggunaan pemilihan strategi kebijakan penanggulangan dan penghapusan yang maksimal. Agar masyarakat miskin ekstrem dapat terbantu dengan ketepatan kebijakan strategi pemerintah daerah yang diberikan dengan mendapat bantuan dan pendapatan agar keluar dari garis kemiskinan ekstrem.

Profil Kebijakan

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menetapkan landasan hukum untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Visi presiden adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong. Misi kedua presiden adalah untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Misi ini sejalan dengan agenda pembangunan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, karena manusia adalah modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang merata dan melibatkan masyarakat di seluruh wilayah. Oleh karena itu, untuk mencapai pengentasan kemiskinan, diperlukan peningkatan daya saing sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan memiliki karakteristik tertentu.²⁰

Selain itu juga dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dimana Instruksi Presiden tersebut memberikan mandat untuk daerah kabupaten/kota untuk dapat melakukan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Sama halnya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022-2024. Pada surat keputusan ini tercantum daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.²¹²²

Kabupaten Lampung Selatan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor:B/59/V.01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebagai upaya dalam berkolaborasi membuat strategi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor:B/203/V.01/HK/2023 tentang Lokasi Prioritas Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023-2024, serta Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor:29 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lampung Selatan.

Penanggulangan Kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dilakukan beberapa program kegiatan diantaranya:

1. Program Ketenagakerjaan
2. Program Bantuan Sosial
3. Program Jaminan Kesehatan
4. Program Beasiswa Pendidikan
5. Program Rehab Rumah Tidak layak Huni
6. Program Bantuan Sambungan Sanitasi Layak
7. Program Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan Usaha

Aktor Kunci Kebijakan

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sebagai menteri yang mengeluarkan keputusan kabupaten/kota yang menjadi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem, Menko PMK sangat penting karena bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan mengeluarkan kebijakan dalam penggunaan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang harus ditindak lanjuti oleh daerah. fungsi dari Menko PMK antara lain yaitu:

- a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- d) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- e) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden..²¹

2. TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)

TNP2K memiliki peran penting dalam berkoordinasi dengan tim yang ada di daerah-daerah yaitu TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) untuk saling berkoordinasi hingga tingkat terendah (desa) dalam membuat strategi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah. Mandat Utama TNP2K adalah Memperbaiki sasaran program berbasis rumah tangga dan wilayah; dan memperbaiki mekanisme penyaluran program. Berikut ini adalah tugas pokok TNP2K antara lain:

- a) Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- b) Bersinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga.
- c) Melakukan pengawasan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan.²³

3. TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Lampung Selatan

Sebagai koordinator di daerah atau perwakilan pemerintah daerah TKPKD memiliki peran penting berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait di daerah bahkan hingga ketingkat terendah untuk menentukan strategi kebijakan yang akan dilakukan daerah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden kemiskinan ekstrem 0% tahun 2024. TKPKD kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 perangkat daerah yang di ketuai oleh Bupati. TKPKD sendiri dilaksanakan dengan oleh Bappeda sesuai dengan tupoksi tambahan Bappeda sebagai sekretariat TKPK daerah.²⁴

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebesar 2,43% hal ini masih belum sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang menghendaki kemiskinan ekstrem 0%. Meskipun telah dilakukan penanggulangan kemiskinan namun masih banyak warga miskin dan miskin ekstrem di daerah tersebut.

Peran pemerintah pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan dalam menentukan strategi kebijakan dalam penanggulangan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah. Karena jumlah

bantuan yang diberikan belum tepat dalam mengenai sasaran penerima manfaat, hal ini dilihat dari penurunan angka kemiskinan ekstrem yang belum terlalu signifikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi untuk dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem lebih signifikan dengan melakukan perbaikan perencanaan pada strategi kebijakan yang lebih tepat dan koordinasi antar pihak baik pemerintah maupun lembaga swadaya dalam memberikan bantuan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang lebih tepat sasaran.

Anggaran untuk penyaluran bantuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan teranggarkan setiap tahunnya dengan realisasi capaian hingga 80%, hal ini sesuai dengan Instruksi presiden Nomor 4 tahun 2022 dan Surat Edaran Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang penggunaan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem daerah, agar masyarakat dalam kategori miskin ekstrem mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

Rekomendasi Alternatif Kebijakan

Usulan rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dari hasil *policy paper* ini berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Kabupaten Lampung Selatan maka dapat dirumuskan alternatif kebijakan yang terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Strategi *Strength-Opportunity* (S-O) yaitu dengan menggunakan kekuatan internal yang ada untuk memanfaatkan peluang eksternal.
2. Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O) yaitu strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dan meminimalkan kelemahan.
3. Strategi *Strength-Threat* (S-T) yaitu strategi yang bertujuan untuk menggunakan seluruh kekuatan dalam mengatasi ancaman.
4. Strategi *Weakness-Threats* (W-T) yaitu strategi yang dilakukan dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada serta menghadapi ancaman.

Tabel 1. Analisis SWOT pada Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

ANALISIS SWOT	<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)
	Tim Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pemerintah setempat harus	Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran

	membuat perencanaan program, serta kualitas pelayanan yang lebih baik	Letak geografis daerah yang sulit di jangkau
Opportunity (Peluang)	Strategi SO	Strategi WO
Adanya anggaran bagi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	Membuat program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan fokus pada masyarakat kategori miskin ekstrem ekstrem	Membagi anggaran program penanggulangan kemiskinan dengan tepat sesuai dengan lokasi fokus kemiskinan
Adanya bantuan dari pihak luar seperti Lembaga swasta/BUMN/BUMD	Membuat program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dari pihak luar	Memberikan bantuan bagi secara merata sampai ke daerah-daerah terpencil, memperluas SRA bagi semua keluarga miskin
Threat (Ancaman)	Strategi ST	Strategi WT
Rendahnya kualitas pendidikan dan keahlian tenaga kerja	Memberikan program beasiswa pendidikan dan sosialisasi bagi pekerja	Memberikan alternatif bantuan pendidikan (paket A dan B), sosialisasi usaha kecil dan menengah langsung ke tingkat desa
Kemalasan dan tidak adanya motivasi bekerja sebagian masyarakat		

Dalam hal ini Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan selaku koordinator yang mewakili pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan publik sebagai strategi dalam penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, selain melakukan strategi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Berikut adalah strategi *Four Planning* (4P) yaitu:

1. *Planning Regulation* (Kebijakan/aturan perencanaan)

Dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan, Surat Keputusan Lokasi Fokus Kemiskinan, Surat Edaran Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem Kabupaten Lampung Selatan.

2. *Planning Discussion* (Diskusi perencanaan)

Dilakukan melalui pelaksanaan rapat koordinasi TKPK tingkat kabupaten dan pelaksanaan ToT (*Training Of Trainer*) penggunaan SiBangKodir kepada seluruh perangkat daerah yang memiliki kewenangan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, kecamatan dan seluruh operator desa.

3. *Planning Use Smart Book* (Perencanaan menggunakan buku pintar/Buku Saku)

Dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT), Laporan Triwulan Kemiskinan, Buku Panduan SiBangKodir dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).

4. *Planning Use Electronic* (Perencanaan menggunakan sistem elektronik/e-planning)

Melalui pembuatan aplikasi pengecekan bantuan yang bisa di akses oleh Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, maupun masyarakat umum yang dinamakan SiBangKodir (Aplikasi Cek Bantuan Langsung Kemiskinan Secara Online dan Pemutakhiran Data Mandiri).

BIBLIOGRAPHY

1. Prawoto N, Selatan JL. Memahami Kemiskinan dan Mengatasi Penanggulangannya. *J Ekon dan Stud Pembang*. 2009;9(1):56-68.
2. Huraerah A. Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *J Kesejaht Sos*. 2013;12(1):3-12.
3. Rah Adi Fahmi G, Setyadi S, Suiro U. Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *J Ekon*. 2018;8(2):227-248. doi:10.35448/jequ.v8i2.4450
4. PMK K. Layanan Data P3KE.
<https://p3ke.kemenkopmk.go.id/tanyajawab/#:~:text=1.,terhadap pendapatan dan layanan sosial>.
5. BPS.go.id. Profil Kemiskinan Indonesia. In: *Profil Kemiskinan Indonesia*. ; 2023.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>
6. Kemenko PMK. Layanan Data P3KE. Published 2022.
<https://p3ke.kemenkopmk.go.id/tanyajawab/#:~:text=1.,terhadap pendapatan dan layanan sosial>.
7. TNP2K. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. In: Kementerian Sekretariat Negara RI; 2020. <https://www.tnp2k.go.id/>
8. Kabupaten Lampung Selatan. RPJMD Lamsel.
9. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan*. TKPKD Lampung Selatan; 2022.
10. Ahmad DRI, AC ST. *Manajemen Strategis*. Nas Media Pustaka; 2020.
11. Abdussamad HZ, Sik MS. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press; 2021.
12. Wisnutama A, Pramono J, Haryanto AT. Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Ji@P*. 2023;12(2). doi:10.33061/jp.v12i2.9002
13. Amien MZ, Dhorifah S, Kholisoh D, et al. Upaya Pencegahan Kemiskinan Ekstrem Melalui Pemberdayaan Singkong Di Desa Derongisor. *J Pengabd Pada Masy*

Indones. 2022;1(2):28-37.

14. Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. *Instr Pres Republik Indones Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskin Ekstrem. 2022;(146187):1-15.*
15. Hasibuan IW, Kamaluddin K, Hardana A. Pengaruh jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi kalimantan barat. *PROFJES Profetik J Ekon Syariah. 2022;1(1):315-333.*
16. Wahyudi EN, Anis Y, Mukti AB, Radyanto R. Pelatihan Program Kewirausahaan Sosial Dalam Rangka Pengurangan Angka Kemiskinan Ekstrem Nasional Di Kabupaten Pematang. *J Pengabd Masy Intimas (Jurnal INTIMAS) Inov Teknol Inf Dan Komput Untuk Masy. 2022;2(2):104-108. doi:10.35315/intimas.v2i2.9018*
17. Harahap M. Analisis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Medan. *J Econ Curr Study. 2023;5(2):85-94. doi:10.51178/jecs.v5i2.1535*
18. Suharlina H. Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. In: *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan. ; 2020:56-72.*
19. Wisnutama A, Pramono J, Haryanto AT. Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Jl@ P. 2023;12(2).*
20. Bappenas. RPJMN 2020-2024. In: ; 2020.
21. PMK K. Kemenko PMK. In: Kemenko PMK; 2024.
<https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk>
22. Menko PMK. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2022. In: Menko PMK Republik Indonesia; 2022.
23. TNP2K. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Published online 2024. <https://www.tnp2k.go.id/about/about-tnp2k>
24. Kabupaten Lampung Selatan. Surat Keputusan TKPK Kabupaten Lampung Selatan. In: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; 2024.